

KLASTER KLASTER

MEDIA INTERNAL PT. IMIP

PARADIGMA BARU CSR PT IMIP

BERI KAIL, BUKAN IKAN

Supply Chain Energi Listrik
di Kawasan IMIP

Kisah Para Asgar
di Lingkar Tambang

Gerbang Ekspor
Kawasan Industri IMIP





DAFTAR ISI

SECANGKIR KOPI	3
LAPORAN UTAMA	
Bukan Proyek Bagi-Bagi Duit	4
Beri Kail, Bukan Umpan	6
Kisah para asgar di lingkaran Tambang	8
ZONA HIJAU	
Merajut Kembali Sabuk Hijau Bahodopi	10
PERSPEKTIF	
Kawasan Industri Generasi ketiga	12
KINERJA	
Supply Chain Energi Listrik di Kawasan IMIP	16
GALERI FOTO	
Galeri HUT RI ke-73 di Kawasan IMIP	18
KILAS KAWASAN	22

Majalah Klaster Diterbitkan oleh : Departemen Eksternal PT IMIP Site Morowali, **Pelindung :** Alexander Barus (Chief Executive Officer), Irsan Widjaja (SVP Business Process), Slamet V. Panggabean (SVP External Relation Department Head), **Pengarah Redaksi :** Hendra D. Willar, Askurullah, Dedy Kurniawan, Thomas Deni Bintoro, Ronny Preslysia, **Penanggungjawab Redaksi :** Dedy Kurniawan, **Redaksi :** Departemen Eksternal PT IMIP Site Morowali.

CSR, Bukan Charity Atau Filantropi

Oleh : Dedy Kurniawan

Koord. Komunikasi dan Hubungan Media PT IMIP

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal di Indonesia sejak awal 1970-an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya merupakan kegiatan karitatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata.

Kesadaran perusahaan dalam melaksanakan CSR saat ini kian tumbuh dan berkembang. Program CSR ini akan diarahkan untuk tumbuh dan berkembang yang sifatnya membangun kebersamaan untuk saling menguntungkan.

Artinya, dilansir dari Harian Kompas, ada pola pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemiskinan di sekitar lingkungan perusahaan berada. Perusahaan pun dituntut agar dalam pelaksanaan program CSR, tak lagi membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Tetapi harus menciptakan program yang bisa mendorong kemandirian masyarakat dalam berusaha.

Program CSR ini sangat strategis, karena CSR bukan hanya sekadar kegiatan belas kasih belaka perusahaan. Praktek CSR ini digunakan perusahaan dalam rangka mengambil peran dan ikut serta menghadapi perekonomian menuju pasar bebas.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil (1992), menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Dalam perspektif perusahaan, keberlanjutan yang dimaksud adalah merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dari masing-masing stakeholders.

Ada lima elemen sehingga konsep pembangunan yang berkelanjutan bagi perusahaan dalam menjalankan praktek CSR mencapai sasaran, yakni ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung

jawab sosial, terimplementasi ke dalam kebijakan corporate, masyarakat, dan pemerintah, dan mempunyai nilai keuntungan.

Agar pelaksanaan CSR yang di dalamnya terkandung konsep responsibility, penekanan yang signifikan harus diberikan kepada kepentingan-kepentingan stakeholders perusahaan.

Artinya, di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya, sedangkan stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, konsumen, pemasok atau supplier, masyarakat, lingkungan sekitar dan pemerintah sebagai regulator.

CSR dapat juga kita sebut sebagai gagasan baru atau strategi baru dalam perusahaan yang berorientasi kepada bisnis yang berkelanjutan. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan aspek financial saja (single bottom line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan, biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Ada empat sisi model dari struktur CSR yang menjadi pegangan perusahaan dalam tanggung jawab ekonomis, yaitu berbisnis dan mendapatkan profit. Selain itu, ada tanggung jawab legal, artinya keharusan membayar pajak, memenuhi persyaratan Amdal, dan lain-lain. Di luar itu ada tanggung jawab ethical atau etis, misalnya perusahaan berlaku fair, tidak membedakan-bedakan ras, gender, tidak korupsi, dan hal-hal lainnya. Sementara yang keempat adalah tanggung jawab discretionary, tanggung jawab yang seharusnya tidak harus dilakukan, tapi perusahaan melakukan atas kemauan sendiri.

Mereka sangat memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan kesejahteraan karyawannya serta melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kelompok ini juga memasukkan CSR sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam

model bisnis atas dasar kepercayaan bahwa suatu usaha harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Di awal berdirinya tahun 2015 lalu, konsep pengelolaan CSR yang dilakukan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) lebih pada kegiatan filantropi. Pemberdayaan dilakukan dengan mengucurkan dana segar secara berkala kepada masyarakat atau pencairan dana setiap kali ada proposal yang diajukan kelompok masyarakat kepada perusahaan.

Melalui pemerintah desa, anggaran diberikan secara langsung dengan memberikan kewenangan penuh untuk mengelolanya. Namun terlebih dulu melalui mekanisme yang ada di perusahaan. Pengajuan dilakukan dengan menyerahkan proposal kegiatan ke perusahaan.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap program yang berjalan, hasilnya banyak yang tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Hal itu berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh perusahaan.

Saat pertama kali melaksanakan program CSR, perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebuah kegiatan, tidak didasarkan pada analisis teknis. Sekarang, PT IMIP punya standar teknis untuk menghitung RAB yang diajukan masyarakat. Selain itu, sesuai kesepakatan dengan seluruh desa binaan yang masuk dalam lingkaran tambang PT IMIP, pencairan dana CSR diberikan secara bertahap atau termin. Berbeda dengan sebelumnya yang pencairannya dilakukan dalam bentuk gelondongan.

Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberikan pemberdayaan dan mendorong masyarakat khususnya di lingkaran tambang PT IMIP untuk berpikir dan bertindak lebih maju untuk peningkatan ekonominya sehingga pola hubungan yang terbangun dengan perusahaan adalah yang saling menguntungkan dan membutuhkan (simbiosis mutualisme) baik secara ekonomi dan sosial.

Hal semacam ini, tentu saja sesuai dengan harapan para Founding Fathers PT IMIP yang menginginkan agar keberadaan perusahaan memberi manfaat sebesar-besarnya baik kepada masyarakat, lingkungan dan negara Republik Indonesia ini.***

Bukan Proyek Bagi-Bagi Duit

► Paradigma Baru CSR PT IMIP

MOROWALI - Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan perusahaan terhadap CSR laksana bola salju yang menggelinding semakin besar. Mayoritas perusahaan, baik yang bergerak di sektor ekstraktif, sektor genetik, sektor manufaktur, dan jasa dalam arti luas berupaya untuk melaksanakan CSR dengan optimal.

Dulunya, aktivitas CSR lebih banyak dilandasi oleh kegiatan filantropi (kedermawanan, sumbangan atau bagi-bagi duit). Padahal, substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengan lingkungannya, komunitas, dan berbagai pihak yang terkait dengannya, baik lokal, nasional maupun global.

Di awal berdirinya, konsep pengelolaan CSR yang dilakukan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) lebih pada kegiatan filantropi. Pemberdayaan dilakukan dengan mengucurkan dana segar secara berkala kepada masyarakat atau pencairan dana setiap kali ada proposal yang diajukan kelompok masyarakat kepada perusahaan.

Melalui pemerintah desa, anggaran diberikan secara langsung dengan memberikan kewenangan penuh untuk mengelolanya. Namun terlebih dulu melalui mekanisme yang ada di perusahaan. Pengajuan dilakukan dengan menyerahkan proposal kegiatan ke perusahaan.

“Pada pelaksanaan program CSR sebelumnya, anggaran yang disalurkan sebesar Rp 7,5 miliar per tahun. Itu CSR Reguler waktu masih dikelola PT BDM (BintangDelapan Mineral). Anggaran itu dibagi dua. Rp 2,5 miliar digunakan dalam bentuk subsidi BBM, yang diperuntukkan bagi listrik

desa. Sisanya, Rp 5 miliar diserahkan secara langsung dalam bentuk gelondongan. Dana CSR itu ditransfer ke rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan. Kemudian TPK Kecamatan mendistribusikannya ke TPK Desa,” kata Jaimu, Staf Divisi Community Relations (Comrel) PT IMIP belum lama ini.

Angka Rp 7,5 miliar itu, tidak termasuk bantuan pendanaan yang diberikan manajemen PT IMIP setiap kali ada proposal yang diajukan kelompok masyarakat, baik di sekitar Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Tadinya, kata Jaimu, tahun 2011 terdapat sembilan desa lingkaran tambang yang masuk dalam prioritas. Berjalannya waktu, pada tahun 2015, jumlah prioritas desa bertambah menjadi 12 desa lingkaran tambang atau seluruh desa yang berada di lingkup Kecamatan Bahodopi.

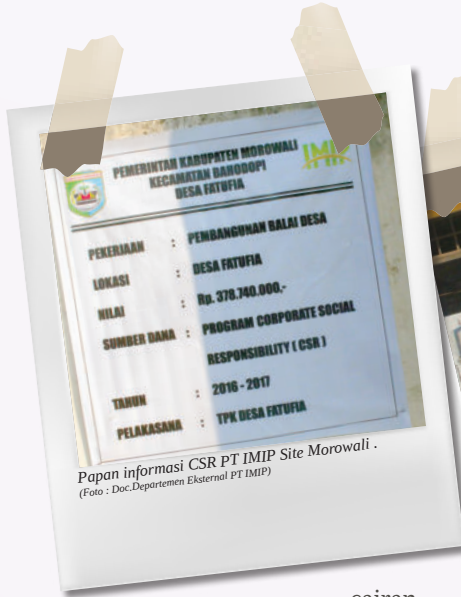
Setelah dilakukan evaluasi terhadap program yang berjalan, hasilnya banyak yang tidak sejalan dengan visi dan misi yang ada perusahaan. Hal itu berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh perusahaan.

“2017 – 2018, perusahaan melakukan evaluasi di lapangan. Hasilnya, banyak kegiatan yang dibiayai dana CSR tidak sesuai dengan perencanaan. Atas dasar itu, mekanisme CSR diubah. Sekarang, tim CSR dan Comrel PT IMIP turun lapangan melakukan verifikasi secara langsung,” jelas Jaimu.

Di awal juga, kata Jaimu, perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak didasarkan pada analisis teknis. Sekarang, IMIP punya standar teknis untuk menghitung RAB yang diajukan oleh masyarakat. Selain itu, sesuai kesepakatan dengan seluruh desa binaan yang masuk dalam lingkaran tambang PT IMIP, pen-



Assesment oleh tim CSR PT IMIP di Desa Fatufia. (foto - Doc.Department Eksternal PT IMIP)



Papan informasi CSR PT IMIP Site Morowali .
(Foto : Doc.Departemen Eksternal PT IMIP)



Tim verifikasi lapangan, Divisi Comdev Departemen Eksternal PT IMIP. (Foto : Doc.Departemen Eksternal PT IMIP)



Papan informasi CSR PT IMIP Site Morowali .
(Foto : Doc.Departemen Eksternal PT IMIP)

cairan dana CSR diberikan secara bertahap atau termin. Berbeda dengan sebelumnya yang pencairannya dilakukan dalam bentuk gelondongan.

“Sebelum pencairan, masyarakat atau tim yang dibentuk masing-masing desa harus membuat laporan perkembangan sebelum akhirnya pencairan tahap kedua diberikan. Dulunya tidak ada akad antara pihak perusahaan dengan pihak desa yang menerima dana CSR itu. Sekarang, akad itu dimasukkan dalam proses. Soal jenis usulan program CSR apa yang akan dilaksanakan, dikembalikan ke masing-masing desa,” urai Jaimu.

Koordinator Community Development (Comdev) dan CSR PT IMIP, Ronny Preslysia, mengatakan bahwa pengelolaan CSR yang dilakukan IMIP, 40 persen difokuskan pada pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), 60 persen diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur yang ada di daerah. Hal itu dilakukan tentunya dalam menunjang sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pemerintahan.

“Berbicara soal ini (pengembangan infrastruktur), memang dilakukan sebagai wujud peran serta IMIP dalam membangun daerah,” kata Ronny.

Secara spesifik, lanjutnya lagi, belum ada pembinaan UMKM yang dilakukan oleh perusahaan. Meski begitu, ke depan hal itu akan dilakukan demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saat ini, perusahaan lebih difokuskan pada pengembangan peternakan dan pembuatan kebun percontohan. Tujuannya, supaya masyarakat bisa belajar.

Untuk menghindari tumpang tindih program yang dilakukan oleh IMIP dan pe-

merintah setempat, jelas Ronny, sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan IMIP haruslah terjalin.

“Ini juga dilakukan, supaya meminimalisir praktek-praktek korupsi. Transparansi tentu saja sangat dibutuhkan. Olehnya itu, perusahaan juga punya tanggung jawab kepada pemerintah setempat untuk memberikan informasi mengenai program CSR yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan,” jelas Ronny Preslysia.

Dalam hal ini, kata Ronny Preslysia, masyarakat nantinya juga akan berpartisipasi dalam memantau kinerja pemerintah. Masyarakat akan menjadi public watchdog.

Pemerintah Kabupaten Morowali sendiri, menyambut positif paradigma baru yang dilakukan PT IMIP dalam penyaluran dana CSR. Meski demikian, mereka mengharapkan dalam penyusunan program atau kegiatan yang hendak dilakukan menggunakan dana CSR tersebut, pihak kabupaten harusnya dilibatkan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Morowali, Hasim SPI mengatakan, menyangkut perencanaan, pengusulan serta pengelolaan CSR yang dibiayai oleh PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, sama sekali belum diketahui. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan atau informasi tentang bentuk fisik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) se-Kecamatan Bahodopi itu seperti apa.

Hasim mengatakan, dalam perencanaan serta penyusunan awal RPJMDes, termasuk rencana pembangunan masing-mas-

ing desa yang dibiayai dana CSR khususnya di Kecamatan Bahodopi, pihaknya dilibatkan untuk menyelaraskan program pembangunan desa dengan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Morowali.

Pemerintah Kabupaten Morowali sangat menginginkan dana CSR dari PT IMIP ini memang benar-benar digunakan dan dikelola oleh desa-desa yang masuk dalam lingkaran tangbang di Kecamatan Bahodopi terutama untuk pengembangan ekonomi-ekonomi lokal masyarakat. Tujuannya, untuk menghindari tuduhan bahwa penyerahan dana CSR itu adalah program bagi-bagi uang oleh PT IMIP kepada masyarakat.

“Seharusnya pelaporan serta penyusunan program kegiatan pembangunan di desa yang ada di Kecamatan Bahodopi dan dibiayai menggunakan dana CSR itu harus dituangkan ke dalam RPJMDes,” kata Hasim.

Meski demikian, kata Hasim, pihaknya menilai positif penyaluran dana CSR PT IMIP ini, karena fungsinya sebagai sarana pemberdayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Bahodopi. Untuk itu diharapkan, pemanfaatan dan pengelolaan dana CSR ini harus dikawal agar benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Hasim mengatakan, keberadaan PT MIP saat ini telah mampu memberdayakan masyarakat lokal untuk peningkatan perekonomiannya. Pelibatan warga untuk menyuplai sembako dan lain-lain ke kawasan PT IMIP telah membantu memutar roda ekonomi di Kecamatan Bahodopi. Selain itu, PT IMIP juga berperan aktif dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Morowali. Syafrudin Husen/AY/DK



Aktivitas bongkar muat barang oleh Supplier di Warehouse PT IMIP. (Foto : Doc. Departemen Eksternal PT IMIP)

Beri Kail, Bukan Ikan

► Wajah Baru Pengelolaan CSR, Ekonomi Meningkat Masyarakat Sejahtera

MOROWALI - Selama 66 tahun silam, kegelapan sudah sempurna di seantero Bahodopi walau waktu baru menunjukkan pukul 19.00 wita. Listrik? Jangan tanya soal fasilitas mewah itu. Selama republik ini berdiri, Kecamatan Bahodopi yang waktu itu masih bergabung dengan Kecamatan Induk, Bungku Selatan, tak pernah sekali pun digerayangi listrik walau hanya semenit saja.

Beruntung pada tahun 2011, PT BintangDelapan Mineral menyumbangkan mesin genset kepada warga. Namun saat itu, listrik hanya menyala selama tiga jam yakni dari pukul 18.00 hingga 21.00 wita.

Tak berselang lama kemudian, PT IMIP yang menjadi pengelola kawasan industri pertambangan Morowali dimana PT BintangDelapan Mineral juga ada di dalamnya, memberikan bantuan mesin genset kepada 12 desa yang ada di Kecamatan Bahodopi. Alhasil, masyarakat akhirnya bisa menikmati listrik selama 12 jam.

Melihat aktifitas perekonomian di Kecamatan Bahodopi yang meningkat hingga mencapai 60 persen sesuai data BPS Mo-

rowali tahun 2016, pihak manajemen PT IMIP akhirnya bersepakat memberikan sebagian daya listrik dari mesin pembangkit PLTU yang ada di dalam kawasan PT IMIP sebesar lima megawatt untuk Kecamatan Bahodopi dan sekitarnya, termasuk Bungku, Ibukota Kabupaten Morowali. Listrik dari PT IMIP itu akan dikelola oleh PT PLN.

Selain masyarakat di Kecamatan Bahodopi, listrik dari PT IMIP itu juga bisa dinikmati masyarakat di Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Timur, bahkan sampai Kecamatan Bungku Tengah.

Dampak dari adanya listrik selama 24 jam ini berpengaruh besar memutar roda perekonomian di Kecamatan Bahodopi. Aneka usaha warga baik skala kecil atau menengah tumbuh bak jamur di musim hujan. Tak jarang, empat sampai lima kios berdiri berjejer saling bersebelahan.

Selain perdagangan, sektor usaha jasa pun juga terbilang sama. Usaha mikro seperti rumah kos, salon, perbengkelan, jahit menjahit atau pencucian kendaraan

bermotor (dosmering) juga ramai dilakukan warga. Bahkan ada sejumlah warga yang membuka usaha penginapan.

Fakta ini membuktikan, keberadaan kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), telah mengubah wajah Bahodopi. Kawasan industri hasil patungan swasta Tiongkok-Indonesia ini terus menggerakkan roda ekonomi Bahodopi dan sekitarnya. Saat ini, dari daerah terpencil, Kecamatan Bahodopi, bersolek menjadi sentra ekonomi baru di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah.

Tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini pun tak luput dari perhatian manajemen PT IMIP. Melalui diskusi dan perencanaan matang, manajemen PT IMIP kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi supplier bahan pokok demi memenuhi kebutuhan makan puluhan ribu karyawannya.

Metode yang digunakan adalah, memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Karang Taruna yang berada di sekitar Kecamatan Bahodopi. Nan-

tinya, untuk memasok bahan makanan ke PT IMIP, para supplier ini harus tergabung dalam satu wadah, baik BUMDes atau Karang Taruna. Selain bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di lingkaran tambang Kecamatan Bahodopi, syarat harus bergabung dengan BUMDes dan Karang Taruna juga agar pengaturannya lebih mudah karena satu pintu.

Data yang diperoleh dari Warehouse Office PT IMIP, tercatat sebanyak 37 vendor atau supplier, yang bekerja sama untuk menyuplai bahan makanan, mulai dari beras, ikan, daging sapi, daging ayam, telur, sayur, buah-buahan, sampai rempah-rempah atau bumbu masak.

Kepala Warehouse Office IMIP, Theo Safiro, melalui staff-nya, Rendra Khristanto, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan, hampir setiap hari para supplier ini memasukkan barang ke gudang. Masing-masing dari mereka, punya periode pengiriman yakni 13 hari. Di samping jumlah, para supplier ini juga diwajibkan harus senantiasa menjaga kualitas produk yang dimasukkan ke perusahaan.

“Karena, mengingat kebutuhan bahan makanan serta rempah-rempah bisa dikatakan cukup besar, makanya stok dan kualitas bahan makanan di gudang harus terjaga,” kata Rendra Khristanto.

Salah seorang supplier, Andi Ridwan Asapa mengatakan, pemberdayaan yang dilakukan oleh IMIP ini, sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyuplai bahan makanan ke kawasan PT IMIP, secara langsung perusahaan tentunya menambah nilai ekonomi masyarakat.

Andi Ridwan Asapa, yang juga menjadi tim Monitoring BUMDes Fatufia, tergabung dalam BUMDes Fatufia Kecamatan Bahodopi. Dirinya bersama empat rekan lainnya, masing-masing Nasruddin (Ketua BUMDes), Basruddin (Ketua Badan Pemberdayaan Desa), Kiswan (Aparatur Desa), dan Muhrim (Sekretaris BUMDes), diberi kepercayaan untuk memasok daging ayam ke PT IMIP. Dalam satu periode (13 hari), mereka menyuplai daging ayam sebanyak 8 ton.

“Pembagiannya dilakukan dengan cara penunjukan. BUMDes, menunjuk masyarakat untuk bertanggung jawab menyuplai bahan makanan ke pabrik. Seperti, distribusi ikan diberikan kepada warga Dusun 5 Desa Fatufia, sebab di daerah itu merupakan salah satu penghasil ikan di Morowali,” urai Andi Ridwan Asapa.

Untuk distribusi telur, lanjutnya lagi, diberikan tanggung jawab kepada Mahrawi (masyarakat desa). Distribusi beras



Aktivitas bongkar muat barang oleh Supplier di Warehouse PT IMIP. (Foto : Doc-Departemen Eksternal PT IMIP)

dibebankan kepada Awaluddin (Bendahara BUMDes). Sementara, untuk distribusi sayur diberikan kepada Rahmatia yang membawahi lima orang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Desa Fatufia untuk memasok sayur ke PT IMIP.

Andi Ridwan Asapa menguraikan, desanya diberikan kesempatan untuk menyuplai beberapa jenis bahan makanan, masing-masing ikan, daging ayam, beras, telur, dan sayur. Dirinya menyebut, untuk ikan disuplai sebanyak 13 ton dalam satu periode (13 hari). Begitu juga dengan bahan makanan lainnya, seperti ayam 8 ton dalam satu periode, beras 500 kilogram (dalam kemasan 25 kilogram), telur 500 kilogram dalam satu periode, dan sayur sebanyak 4 - 7 ton per satu periode.

Lanjutnya lagi, kerja sama yang terjalin antara PT IMIP dengan masyarakat desa di bawah naungan BUMDes Fatufia, sudah dimulai sejak 2016 lalu. Masing-masing dari mereka (distributor logistik yang berada di bawah naungan BUMDes Fatufia), kata Andi Ridwan Asapa, diwajibkan untuk memberikan sedikit keuntungan mereka ke BUMDes sebesar Rp 1.000 per satu kilogram-nya.

“Tahun 2016 saja, setoran yang berhasil dikumpulkan nilainya mencapai Rp 120 juta. Meski pada tahun 2017 kemarin, angka itu turun menjadi Rp 100 juta, namun tetap saja ada efek yang diberikan kepada warga tentunya. Setoran itu nantinya akan diberikan kepada warga lokal yang berjumlah 130 Kepala Keluarga (KK) dalam bentuk dana segar,” jelas Andi Ridwan Asapa.

Senada dengan Andi Ridwan Asapa, Abdul Farid (38 tahun) yang tergabung

dalam Karang Taruna Kecamatan Bahodopi, mengatakan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh IMIP, merupakan salah satu langkah strategis untuk ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Abdul Farid, banyak anggota Karang Taruna yang merasa terbantu, karena dengan metode yang dilakukan IMIP, mereka secara bertahap bisa mendongkrak ekonomi keluarga mereka.

“Karena yang masuk di sana, harus berbadan hukum, makanya Karang Taruna membentuk sebuah CV (Perusahaan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap). Namanya CV Gita. Dari situ, melalui penunjukan langsung, masing-masing anggota diberikan tanggung jawab untuk menyuplai bahan makanan demi menunjang kebutuhan makan para karyawan yang angkanya mencapai puluhan ribu orang,” kata Abdul Farid.

Tidak seperti BUMDes Fatufia yang mewajibkan para anggotanya untuk memberikan sedikit keuntungan mereka ke BUMDes, konsep yang dijalankan oleh Karang Taruna (CV Gita), sedikit berbeda. Tidak ada setoran yang dibebankan kepada para anggota yang namanya masuk dalam daftar penyuplai bahan makanan ke pabrik.

Karang Taruna Bahodopi bahkan ikut membantu para anggotanya yang kekurangan dana untuk ikut menjadi supplier. Tentunya ada pembagian hasil keuntungan nantinya. Semua itu tergantung dari banyaknya dana yang diberikan kepada anggota itu, serta hasil kesepakatan bersama antara anggota dan Karang Taruna.

“Kerja sama yang terjalin antara IMIP dengan Karang Taruna Kecamatan Bahodopi sudah terbentuk sejak empat tahun yang lalu. Saya sendiri, dibebankan untuk menyuplai bumbu dapur berupa bawang bombai (*Allium cepa*). Setiap dua minggu sekali, saya masukkan ke pabrik sebanyak 1,5 ton,” kata Abdul Farid.

Penerapan program CSR semacam ini yang mengandung filosofi “Berilah Kail Bukan Ikan”, merupakan keinginan dan harapan dari para owner dan manajemen PT IMIP. Sebab, dengan jumlah karyawan yang mencapai 27 ribu orang, kebutuhan bahan makanan setiap harinya di PT IMIP cukup besar. Kondisi ini menimbulkan simbiosis mutualisme. PT IMIP butuh pasokan bahan makanan bagi karyawannya dan masyarakat butuh bantuan untuk peningkatan ekonominya.

Diharapkan, program CSR semacam ini akan terus berkembang sehingga keberadaan kawasan industri PT IMIP benar-benar memberi manfaat. Tidak hanya untuk para karyawannya, juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. AY/DK

Kisah Para Asgar di Lingkar Tambang

► Dampak Keberadaan PT IMIP

MOROWALI – Suara mendengar mirip lebah terdengar dari wahl (mesin listrik pemangkas rambut) yang sedang digenggam Mahdi. Lelaki berumur 29 tahun tersebut terlihat cekatan mengoperasikan mesin wahl saat sedang melayani seorang konsumen di lapak pangkas rambutnya.

Tak sampai sejam, usalah pekerjaan Mahdi. Konsumennya, seorang lelaki yang masih mengenakan seragam salah satu perusahaan di kawasan PT IMIP tersebut, terlihat tersenyum puas. “Aha, keren lagi saya,” katanya sambil menyerahkan dua lembar uang kertas senilai Rp 25 ribu kepada Mahdi.

Meski ber dinding triplek, lapak pangkas rambut milik Mahdi terlihat cukup rapi. Di atas meja kecil terlihat berbagai peralatan mencukur rambut. Mulai dari gunting, wahl, pisau cukur, sisir hingga pomade tersusun rapi mirip peralatan bedah di ruang operasi. Selain itu juga ada lima kursi dan dua kaca besar di ruangan seluas 4x6 meter persegi tersebut. Dua kursi digunakan sebagai tempat duduk konsumen saat sedang dicukur, sedangkan tiga kursi lainnya sebagai tempat duduk konsumen yang antri menunggu giliran.

Sebagai pemilik usaha pangkas rambut yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Mahdi, anak ketiga dari lima bersaudara itu bukan tanpa sebab memilih Bahodopi sebagai tempat untuk mencari nafkah sebagai Asgar (Jasa pangkas rambut).

Bagi Mahdi, Kecamatan Bahodopi seperti magnet bagi orang-orang yang ingin mengadu peruntungannya mencari rezeki. Bagaimana tidak? Sejak kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berdiri dan beroperasi pada September 2013 lalu, Kecamatan Bahodopi diserbu puluhan ribu orang yang hendak mencari kerja. Tak cuma dari Sulawesi Tengah, puluhan ribu pencari kerja itu juga berasal Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa.

Mahdi bercerita, sejak Januari 2018 lalu, dirinya pertama kali membuka usaha asgar atau jasa pangkas rambut di daerah itu. “Saya mendapat saran dari seorang teman. Katanya, kalau buka usaha jasa pangkas rambut di Bahodopi pasti ramai. Karena

jumlah karyawan yang bekerja di kawasan PT IMIP saja sudah mencapai puluhan ribu dan itu belum termasuk warga lainnya yang bekerja di sektor usaha lainnya di sini. Yang pastinya, perekonomian di sini sangat bagus. Keberadaan kawasan PT IMIP sangat membantu kelancaran usaha yang saya rintis ini,” kata Mahdi.

Berbeda di tempat lain dengan usaha sejenis yang setiap bulannya memberikan upah kepada karyawannya, Mahdi memilih konsep bagi hasil kepada karyawannya yang menurut dia lebih adil.

“Setiap hari rata-rata pelanggan yang datang dan minta ditata rambutnya bisa mencapai 25 hingga 40 orang. Itu untuk satu karyawan. Karyawan saya ada tujuh orang. Gaji mereka hitungannya bagi hasil. Jadi, dari jumlah orang yang mereka cukur mereka ambil 60 persen, 40 persennya masuk ke kas saya. Setiap hari mereka bisa terima Rp 500 ribu. Bahkan kalau di awal bulan, bisa sampai satu juta rupiah lebih,” urai Mahdi bangga.

Anak ketiga dari lima bersaudara ini mengatakan, hampir semua karyawan yang bekerja di kawasan industri IMIP, datang ke tempatnya untuk pangkas rambut. Tanpa terkecuali para tenaga kerja asing (TKA). Soal tarif jasa cukur, ia memberikan tarif sebesar Rp 25 ribu untuk dewasa, anak-anak Rp 20 ribu. Tarif yang sama juga ia kenakan kepada para TKA. Kecuali ada pelanggannya yang minta dipijat usai dicukur, akan dikenakan tarif tambahan.

Hebatnya, belum genap setahun di Bahodopi, bapak satu anak ini sudah membuka cabang. Meski lokasinya masih di desa yang sama. Di lokasi usaha yang

pertama, Mahdi mempekerjakan empat orang karyawan lantaran jumlah pelanggannya cukup banyak dan tak terlayani jika hanya dirinya sendiri yang bekerja.

“Tempat yang satunya lagi ada di dekat kantor BRI Bahodopi. Tempatnya lebih besar. Di sana yang jaga tiga orang. Pemasukan dari dua tempat itu bisa mencapai Rp 40 juta per bulan. Tapi itu masih kotor, karena dipotong untuk keperluan sehari-hari dan sewa tempat. Sewanya, tempat pertama Rp 600 ribu per bulan, tempat ke dua Rp 6 juta per tahun karena tanah yang saya sewa,” kata Mahdi.

Mahdi mengatakan, keterampilannya sebagai pemangkas rambut, ia peroleh secara turun temurun dari orang tua dan saudara-saudaranya. Di daerah asalnya, Kecamatan Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi



Aktivitas Asgar (tukang pangkas rambut) di Pangkas Rambut Madura. (Foto: Doc. Departemen Eksternal PT IMIP)

Madura, merupakan kampung para asgar atau tukang pangkas rambut. Masyarakat di desanya, kata Mahdi, merantau sampai ke pelosok Indonesia dengan membuka usaha pangkas rambut.

Keberanian membuka usaha karena melihat peluang, juga dilakoni Nuraida (37), pemilik salah satu salon kecantikan di Desa Keurea. Berlatar belakang kegagalannya berumah tangga, Ida, panggilan akrabnya, memberanikan diri terjun ke dunia bisnis yang sama sekali belum pernah digelutinya. Bahkan, dia mengaku tidak punya pengetahuan atau pengalaman membuka bisnis salon ini.

Nuraida bertutur, awalnya ia sempat kebingungan karena tak punya keahlian menggunting atau menata rambut. Apalagi soal creambath dan smootieng, sama sekali nihil. Namun, hal itu justru menjadi cambuk bagi dirinya untuk terus belajar.

Semangat dan perjuangan Nuraida akhirnya menuai hasil yang sangat memuaskan. Setiap tahunnya, omzet yang dibukukan oleh usaha salonnya mencapai ratusan juta rupiah. "Sebenarnya, setiap bulan salon saya bisa dapat sampai Rp 30 juta. Tapi takut nanti dikatakan sombong, kita ambil angka tengahnya saja. Tulis saja Rp 15 juta," kata Nuraida sambil terkekeh.

Ida mengatakan, setiap awal bulan, salon miliknya selalu dipadati pengunjung yang ingin



Aktivitas Asgar (tukang pangkas rambut) di Salon Ida 2. (Foto : Doc. Departemen Eksternal PT IMIP)

rambutnya ditata. Setiap awal bulan, rata-rata perhari dari pagi hingga tutup pukul 21.00 wita, jumlah pelanggan yang datang mencapai 100 orang bahkan lebih.

"Soal harga, untuk gunting rambut Rp 20 ribu - Rp 25 ribu. Gunting sambil cuci rambut Rp 50 ribu, creambath Rp 80 ribu selama 40 menit. Massage Rp 150 ribu per satu jam. Untuk smootieng disesuaikan dengan kondisi panjang dan ketebalan rambutnya. Namun tarif yang relatif saya berikan adalah Rp 375.000 sampai Rp 400.000," kata ibu empat anak ini berpromosi.

Ida mengatakan, k e n e k a t a n y a membuka usaha salon itu gara-gara bertemu seorang kenalannya yang menyarankan untuk membuka usaha salon di Kecamatan Bahodopi. Alasannya, Kecamatan Bahodopi sekarang ramai didatangi orang dari berbagai daerah. Selain itu, ada kawasan PT IMIP yang memiliki puluhan ribu

karyawan.

Benar saja, baru lima hari membuka usaha salon, kata Ida, ia langsung tunggang langgang karena kedatangan banyak konsumen yang ingin rambutnya ditata. Kebanyakan pelanggan salonnya berprofesi sebagai karyawan yang bekerja di kawasan PT IMIP. Bahkan, banyak tenaga kerja asing asal Tiongkok juga ikut menjadi pelanggannya. Kondisi itu membuatnya harus merekrut dua orang karyawan untuk membantunya agar pelayanan terhadap pelanggan tetap maksimal.

"Biasanya, para warga asing itu datang di awal-awal bulan sekitar tanggal 1 - 10. Di tanggal-tanggal itu pasti ramai," kata Nuraida.

Bagi Nuraida, keberadaan mega industri kawasan PT IMIP di Bahodopi, menjadi "ladang emas" tersendiri untuk mereka yang ingin merubah nasib. Berkah itu tentunya, kata Nuraida, tak hanya dirasakan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di PT IMIP, tetapi juga yang membuka usaha jasa, berdagang atau bisnis lainnya di wilayah itu.

Kini Nuraida bisa tersenyum bahagia. Penghasilan yang didapat saat ini, juga sudah bisa digunakan di masa yang akan datang. Dari penghasilan sekarang, ia bisa menyekolahkan dan membiayai keempat anaknya.

Baik Mahdi dan Nuraida berharap, usaha jasa yang mereka tekuni bisa lebih berkembang. Melihat semakin berkembangnya kawasan PT IMIP, keduanya bahkan berencana membuka cabang usahanya masing-masing di desa lain yang masih masuk dalam lingkaran tambang PT IMIP. AY/DK





Observasi rencana lahan penanaman mangrove oleh Divisi Environmental PT IMIP Site Morowali. (Foto : Doc. Departemen Eksternal PT IMIP)

Merajut Kembali Sabuk Hijau Bahodopi

Wajah Ucoc terlihat serius. Matanya lekat memperhatikan lingkungan pantai di salah satu sudut Desa Fatufia. Tak lama, tanpa ragu tangannya menjemput pasir bercampur lumpur pantai dan memeriksanya.

“SEPINTAS kondisi lingkungan di sini memenuhi syarat untuk pembudidayaan mangrove. Namun untuk lebih memastikannya, perlu diadakan survey yang lebih detail,” kata Ucoc di suatu siang yang cukup terik.

Lelaki bernama lengkap Johannes Sitorus ini mengatakan, sejak Januari lalu, Divisi Environmental PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) site Morowali, sudah memulai program penghijauan di luar kawasan perusahaan dengan sasaran adalah desa-desa yang berada di lingkaran tambang PT IMIP.

Tahap awal, sudah dilakukan program penanaman 50 ribu bibit di areal seluas kurang lebih lima hektar. Selain di lingkungan pantai dalam kawasan PT IMIP, penanaman juga dilakukan di sekitar pesisir pantai Desa Labota.

“Yang sudah dilakukan penanaman kurang lebih lima hektar dengan kerapatan setiap benih kurang lebih 1 x 1 meter” kata Ucoc selaku team nursery pesisir Divisi Environmental PT IMIP.

Untuk kelanjutan program penanaman mangrove di Desa Fatufia itu, kata Ucoc,

pihaknya bersama Divisi Comdev/CSR dan Divisi Community Relation Departemen Eksternal PT IMIP bekerjasama menyusun tahapan kegiatannya.

Ucoc mengatakan, sama dengan kegiatan penanaman mangrove yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk area pesisir Desa Fatufia, tanaman mangrove yang akan dikembangkan adalah jenis *Bruguiera sp* dan *Rhizophora sp*.

“Kedua mangrove jenis ini banyak terdapat di daerah Morowali secara alami. Jadi kami coba untuk membudidayakannya” ujar Ucoc.

Tahun 2017, Divisi Environmental PT IMIP bekerjasama dengan Universitas Haluoleo Kendari melakukan penanaman 25 ribu bibit mangrove di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sungai Kumpi dan Dusun Kurisa Desa Fatufia yang merupakan wilayah terdekat dari kawasan PT IMIP.

Tantangan terbesar sampai dengan saat ini dalam kegiatan penanaman mangrove di sekitar pesisir kawasan PT IMIP adalah tingginya suhu air laut akibat kegiatan operasional tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dalam kawasan

PT IMIP. Namun, hal itu bisa diselesaikan dengan melakukan survey lokasi pesisir pantai secara menyeluruh pada kondisi pasang dan surut.

Berdasarkan data One Map Mangrove Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015, Indonesia memiliki luas mangrove 3,48 juta hektar setara dengan 23 % luas ekosistem mangrove dunia, namun lebih 50% atau 1,8 juta Ha mengalami kerusakan. Olehnya, IMIP berkomitmen untuk ikut serta dalam memperbaiki ekosistem mangrove di sekitar kawasan IMIP.

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan kelautan. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan (nursery ground) berbagai macam biota, penahan abrasi pantai, amukan badai dan gelombang tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi seperti sebagai penyedia kayu, obat-obatan, alat dan daerah penangkapan ikan.

Sebagai vegetasi endemik yang hidup di antara transisi daerah laut dan daratan di kawasan pesisir, keberadaan hutan mangrove menjadi penting sebagai sabuk hijau (green belt) bagi area pesisir dan sekitarnya. Mangrove memiliki banyak fungsi fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagi masyarakat dan kawasan pesisir. Akar-akar mangrove yang kokoh akan dapat menangkap sedimen dan mencegah abrasi. Selain itu, mangrove pun dapat berperan sebagai pelindung dari bencana gelombang pasang yang biasanya seringkali dihadapi mereka yang tinggal di dekat laut.

Ke depan, kata Ucok, sesuai arahan pimpinan manajemen PT IMIP, penanaman mangrove dapat dilakukan di seluruh kawasan pesisir Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang merupakan pusat operasi perusahaan pengelola kawasan industri khusus berbahan baku nikel tersebut.

Tujuannya, agar sabuk hijau mangrove di kawasan pesisir Kecamatan Bahodopi dapat tumbuh dan kembali berkembang.



Penanaman mangrove yang dilakukan di salah satu bibir pantai Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi.
(Foto : Doc.Divisi Environmental PT IMIP)



Penanaman mangrove di salah satu bibir pantai di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi.
(Foto : Doc.Divisi Environmental PT IMIP)

Masyarakat sekitar pun juga diharapkan berpartisipasi minimal dengan tidak membuang sampah di laut atau membangun pemukiman di kawasan hutan mangrove.

Selain kawasan pesisir, Divisi Environmental PT IMIP juga telah melakukan kegiatan penghijauan di dalam maupun di luar lokasi kawasan dengan berbagai jenis tanaman darat. "Sekarang ini luasan total lahan penghijauan darat di dalam kawasan sudah sebesar 44.869 meter persegi dan akan terus bertambah hingga sesuai dengan ketentuan pada dokumen AMDAL yaitu sebesar 10% dari total luas kawasan," kata Masitoh Siregar dari team nursery darat Divisi Environmental PT IMIP.

Program penghijauan yang diluncurkan Divisi Environmental PT IMIP dimulai dengan beberapa tahapan yakni, pemilihan jenis bibit yang sesuai dengan kondisi kawasan, pengembangan bibit pada area nursery, pemantauan,

perawatan serta pemeliharaan rutin bibit pada area nursery, pemilihan lokasi penanaman dan terakhir pemindahan bibit dari nursery ke lokasi penanaman.

"Waktu yang dibutuhkan dari keseluruhan proses tersebut rata-rata kurang enam bulan atau ketika tinggi tanaman sudah mencapai kurang lebih 50 cm" kata Masitoh.

Team nursery darat, kata Masitoh, saat ini fokus pada pengembangan serta penghijauan bibit tanaman khas lokal atau endemik asli morowali dan juga tanaman dengan fungsi khusus seperti untuk penyerapan gas CO₂, reduksi debu maupun untuk mengurangi pencemaran nikel di dalam tanah.

Tanaman dengan jenis seperti Trembesi, Ketapang, Tanjung, Cemara Kipas, Asam Jawa, Cemara Hutan, Palm Ekor Ikan dan Mpire menjadi jenis tanaman yang akan ditanam untuk kegiatan penghijauan di darat.

Khusus untuk penghijauan darat, selain kegiatan di dalam kawasan, Divisi Environmental PT IMIP juga aktif dan berperan serta di dalam kegiatan penghijauan di luar kawasan. Pada tahun 2017 dalam rangka mendukung kegiatan Adipura, divisi environmental berpartisipasi membagikan bibit pohon trembesi dan bibit mangrove kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Pada hari bumi, 21 April 2018 lalu, PT IMIP juga membagikan bibit tanaman ketapang hias dan mangrove kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali.

Masitoh mengatakan, tantangan yang dihadapi pihaknya dalam program penghijauan itu adalah jumlah bibit tanaman tahunan dan tanaman endemik khas morowali yang terbatas, sehingga perlu dilakukan pemesanan dari daerah luar untuk jenis bibit tanaman tersebut.

Selain itu, kata Masitoh, pihaknya juga akan melakukan pengembangan dengan membangun Botany Garden seluas kurang lebih tiga hektar di Desa Bahomakmur. Selain menjadi sarana penghijauan, area tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada karyawan, masyarakat sekitar dan siswa sekolah di sekitar kawasan PT IMIP. Lunaria Mardhika Jenne / DK

Kawasan Industri Generasi Ketiga di Indonesia

Dr. Dedy Mulyadi MSi
Executive Directors PT IMIP

#Sambungan tulisan Edisi No.3-Februari 2017.



Kawasan Industri PT IMIP. (Foto: Doc. Departemen GA PT IMIP)

► Resiko Pengembangan Kawasan Industri

Selain dampak positif atau keuntungan yang didapat dari pengembangan industri, juga terdapat resiko yang biasanya berdampak pada aspek lingkungan. Misalnya pencemaran lingkungan akibat polusi dan limbah yang dihasilkan oleh industri. Polusi tersebut dapat berupa polusi udara, air, suara ataupun tanah yang umumnya dirasakan oleh penduduk yang berada di sekitar industri. Pengolahan limbah yang dilakukan secara terintegrasi serta pengelolaan dampak terhadap lingkungan di dalam kawasan industri akan mempermudah pengawasan dan pengendalian oleh petugas lingkungan.

► Permasalahan terkait Kawasan Industri

SELAIN keuntungan dan resiko pengembangan kawasan industri sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat pula permasalahan dalam

pengembangan kawasan industri antara lain terkait lingkungan hidup. Semakin meningkatnya perhatian dunia pada lingkungan hidup juga berakibat pada semakin ketatnya ketentuan lingkungan hidup di Indonesia terutama untuk kegiatan industri. Masalah yang seringkali timbul yaitu mengenai izin pengelolaan limbah B3 yang semakin mutakhirnya mengikuti perkembangan aturan-aturan yang diciptakan pada konvensi lingkungan hidup internasional. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan industri yang tadinya diperbolehkan kemudian dinilai sebagai kegiatan yang membahayakan lingkungan sehingga berakibat pada izin usaha industri, izin impor bahan baku, izin ekspor, dan sebagainya. Di sinilah perlunya pengawasan dan manajemen pengelolaan dari pihak pengelola kawasan industri.

Selain masalah lingkungan hidup, terdapat pula permasalahan dengan

penataan ruang yaitu terkait kawasan peruntukan industri. Ketentuan mengenai kawasan industri (PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri) dalam penyusunannya pun telah mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan penataan ruang bahwa kawasan industri berada di dalam kawasan peruntukan industri dan perusahaan industri wajib berlokasi di dalam kawasan industri.

Dalam mengembangkan kawasan industri, diperlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah khususnya dalam hal perizinan dan mekanisme insentif yang menarik bagi para investor. Namun yang terjadi pada beberapa daerah justru memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan peraturan terkait kawasan industri misalnya retribusi atas izin gangguan oleh Pemerintah daerah yang seharusnya tidak dibebankan pada masing-masing perusahaan in-

dustri, tetapi cukup pada perusahaan pengelola kawasan industri.

Dukungan dalam pengembangan kawasan industri juga dibutuhkan dalam bentuk fisik yaitu infrastruktur pendukung kawasan industri seperti pelabuhan, jalan tol, dan sumber energi. Kebutuhan akan pelabuhan yang dapat menampung cukup banyak kapal dan dapat melayani bongkar-muat barang dengan cepat harus dapat dipenuhi untuk menunjang distribusi barang dan meningkatkan ekspor. Untuk dapat mengakses kawasan industri diperlukan pula jalan tol yang dapat mempermudah dan mengakomodasi kebutuhan industri seperti pembukaan akses pintu tol yang menghubungkan kawasan industri. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh industri Indonesia adalah keterbatasan pasokan energi seperti listrik dan gas untuk kebutuhan produksi.

3. Kawasan Industri Modern Generasi Ketiga

KONSEP kawasan industri generasi ketiga diharapkan mampu menjawab berbagai kekurangan dan kelemahan dari konsep-konsep sebelumnya sehingga diperoleh suatu konsep kawasan industri modern yang berlandaskan pada pembangunan daya saing industri nasional yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Pada tahapan ini, kawasan industri diharapkan dapat mewujudkan konsep Kawasan Industri Modern antara lain dengan ciri-ciri berbasis pada sumber daya industri daerah, didukung oleh sistem infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, inovatif dengan kegiatan penelitian dan pengembangan industri, dan dilengkapi dengan fasilitas pengembangan masyarakat seperti perumahan, institusi pendidikan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Karakteristik kawasan industri modern generasi ketiga dibentuk dari kondisi saat ini dimana kawasan industri dapat memberikan keuntungan maupun resiko serta adanya kebutuhan dalam negeri dan tuntutan dunia internasional.

Keuntungan dan resiko dari pengembangan kawasan industri sebagaimana disebutkan sebelumnya antara lain bahwa kawasan industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur dan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta menimbulkan resiko pencemaran lingkungan.

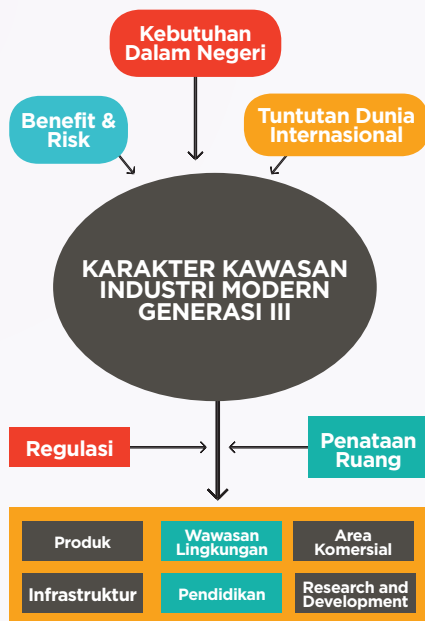
Kawasan industri generasi ketiga sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas dan inovasi industri dalam negeri harus dapat memenuhi kebutuhan perusahaan industri tersebut. Sebagai akibat dari pertumbuhan industri yang semakin pesat diperlukan suatu kebijakan untuk mengendalikan arah pengembangan industri tersebut. Hal tersebut dapat dijawab melalui pengembangan kawasan industri yang berbasis kompetensi inti industri daerah sehingga potensi daerah dapat lebih dioptimalkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta mempercepat pembangunan daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan industri akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja serta mendorong terjadinya alih teknologi melalui para investor yang menanamkan modalnya di kawasan

industri di Indonesia. Proses alih teknologi ini akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah yang menjadi keunggulan komparatif suatu daerah juga dapat menjadi daya tarik bagi para investor lainnya.

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kawasan industri juga harus dapat memenuhi tuntutan dunia internasional. Tantangan bagi industri di Indonesia saat ini adalah bagaimana memproduksi barang yang berkualitas dan memenuhi standar internasional agar dapat bersaing di pasar global. Salah satu standar yang ditetapkan adalah bahwa industri harus ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah green industry. Dalam upaya untuk terus meningkatkan investasi di sektor industri maka diperlukan suatu kebijakan atau insentif yang menarik bagi para investor antara lain kemudahan dan keamanan serta kepastian dalam berinvestasi. Salah satu hal yang menarik bagi investor adalah fasilitas dalam bentuk fisik seperti penyediaan infrastruktur untuk mengakses kawasan industrinya maupun infrastruktur di dalam kawasan industri.

Karakteristik Kawasan Industri Modern Generasi III, secara garis besar terdapat 7(tujuh) aspek, meliputi :

- a. Berbasis Kompetensi Inti/Keunggulan Daerah
- Kebijakan industri diarahkan untuk mengembangkan industri daerah dengan cara optimalisasi potensi sumber daya lokal, maka pengembangan kawasan industri pun diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan industri yang berbasis kompetensi inti industri daerah. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti industri adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Manfaat dari pengembangan kompetensi inti adalah:
 - Terwujudnya pertumbuhan ekonomi oleh karena meningkatnya pendapatan riil masyarakat, meningkatnya penanaman modal dan meningkatnya tabungan masyarakat,
 - Terciptanya full employment atau tingkat pengangguran yang rendah,
 - Memperbaiki ketidakserasian akibat disparitas antarwilayah,
 - Memungkinkan terjadinya kerjasama antardaerah berlandaskan kedekatan dan potensi yang sama serta masuk dalam rantai nilai komoditi yang akan dikembangkan.
- Pengembangan kompetensi inti industri daerah selain didasarkan atas potensi komoditi unggulan yang dimi-



Gambar 1 : Kerangka Berpikir

liki oleh suatu daerah, juga didasarkan atas sejauh mana industri pengolahan di daerah tersebut berkembang yang seringkali bukan berupa industri besar namun industri kecil dan menengah.

b. Penataan Lokasi/Tata Ruang

Kawasan industri dalam konteks penataan ruang termasuk di dalam kawasan peruntukan industri yang merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kawasan peruntukan industri sendiri didefinisikan sebagai bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri). Penetapan kawasan peruntukan industri menurut Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan berdasarkan kriteria: (1) wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; (2) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) tidak mengubah lahan produktif. Kriteria teknis penentuan kawasan peruntukan industri saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kriteria umum penentuan kawasan peruntukan industri meliputi kesesuaian lokasi dengan arahan RTRW terkait, aksesibilitas, infrastruktur, dampak ekonomi dan lingkungan.

Kawasan industri baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan dibangun dengan konsep kawasan industri modern harus tetap memenuhi ketentuan penataan ruang baik itu RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/ Kota serta ketentuan terkait penataan ruang kawasan industri lainnya. Hal ini menjadi penting karena penataan ruang adalah instrumen utama untuk mengatur penggunaan berbagai kegiatan dalam suatu wilayah termasuk kegiatan industri.

c. Infrastruktur yang Terintegrasi dan Lengkap

Kawasan industri modern dirancang agar memiliki infrastruktur dan fasilitas yang terintegrasi untuk membantu pengembangan dan operasional industri termasuk per-

mahan bagi karyawan lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan sarana/tempat komersial yang mendorong tumbuhnya industri baru. Fasilitas-fasilitas dan infrastruktur tersebut disediakan agar kawasan industri tidak lagi bergantung pada kawasan di luarnya. Industri yang beroperasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat memfokuskan aktivitas mereka sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

d. Berwawasan Lingkungan

Kawasan industri yang berwawasan lingkungan salah satu bentuknya dikenal dengan eco-industrial park yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan yang tergabung di dalamnya sekaligus meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi. Komponen dari eco-industrial park antara lain green design dari infrastruktur dan pabrik baik baru maupun penyempurnaan, produksi bersih, pencegahan pencemaran, efisiensi energi, dan kerjasama antarperusahaan.

Keuntungan eco-industrial park bagi industri yaitu:

- Penurunan ongkos produksi melalui peningkatan efisiensi material dan energi, pemanfaatan kembali air, dan menghindari sanksi peraturan pemerintah.
- Peningkatan efisiensi menghasilkan produk-produk yang kompetitif.
- Berbagi jasa konsultasi dan akses informasi.
- Berbagi pelayanan umum: pengelolaan limbah, pelatihan, pengadaan barang, tim penanggulangan bencana, sistem informasi lingkungan dan lain-lain.
- Meningkatkan nilai properti.

Adapun keuntungan eco-industrial park bagi lingkungan yaitu:

- Mengurangi banyak sumber polusi dan limbah sejalan dengan berkurangnya kebutuhan akan sumber daya alam.
- Mengurangi beban lingkungan melalui pendekatan yang lebih inovatif menuju produksi yang lebih bersih (cleaner production) yang meliputi upaya pencegahan pencema-

Tabel 2. Karakteristik Kawasan Industri

Karakteristik	Kawasan Industri Generasi Pertama (1970-1989)	Kawasan Industri Generasi Kedua (1989-Sekarang)	Kawasan Industri Generasi Ketiga (kedepannya)
Produk	Beraneka ragam, belum terfokus	Tidak spesifik	Berbasis kompetensi inti industri daerah/ memiliki pohon industri yang akan dikembangkan
Infrastruktur	Tidak terintegrasi dengan dukungan sarana lain (listrik, air, dsb)	Mengarah pada integrasi sarana dan prasarana penunjang kawasan industri (sekolah, R&D, permukiman, dsb)	Terintegrasi dengan seluruh dukungan sarana (area komersial, R&D, pendidikan, perumahan, listrik, air, dll)
Lingkungan	Kurang intensifnya pengelolaan limbah	Memperhatikan lingkungan	Memperhatikan lingkungan (misal: hutan kota)
Arahan pengembangan	Mendorong pertumbuhan kawasan industri	Menarik investor dan secara bertahap mengarah saling menunjang	Mengarah pada pengembangan kota baru dan kawasan industri modern
Research & Development	Belum terdapat pusat-pusat R&D	R&D dilakukan tersendiri oleh masing-masing perusahaan	Didirikannya pusat-pusat R&D di setiap KI
Regulasi	Belum terintegrasi dengan peraturan terkait lainnya	Peraturan sudah mulai terkoordinasi dengan peraturan lainnya (tata ruang, lingkungan, dll)	Regulasi yang sinergis dan efisien antar sektor industri dengan sektor lainnya
Penataan Lokasi/Tata Ruang	Berada di dalam zona industri	Berada di dalam kawasan peruntukan industri (sejak UUPR 26/2007 dan PP 24/2009)	Berada di dalam kawasan peruntukan industri
Orientasi Bisnis	Jual Lahan	Jual Lahan	Service

Sumber : Dedy Mulyadi



Area Jetty PT BinangDelapan Terminal di kawasan PT IMIP Site Morowali. (Foto: Dae-Depermen Ga PTIMIP)

ran, efisiensi energi, manajemen air, perbaikan alam, dan lain-lain.

- Keputusan mengenai lokasi eco-industrial park, infrastruktur, dan target rekrutmen tergantung pada batasan kapasitas pendukung lokal dan karakteristik ekologi dari lokasi yang potensial.

e. Mengarah pada Pengembangan Kota Baru

Kawasan Industri ke depan yang mengarah pada pengembangan kota baru. Di sisi lain, terdapat pengembangan kota baru mandiri yang melengkapi kegiatan di dalamnya dengan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana perumahan, pendidikan, sarana riset dan kawasan komersial. Selain itu pula, dirancang penyedia fasilitas pengolahan air limbah, air, listrik dan telekomunikasi serta ditinjau sistem jaringan jalan yang memadai.

Bumi Serpong Damai juga membangun kawasan industri pada tahun 1996 dengan luas wilayah kurang lebih 80 ha. Taman Tekno BSD direncanakan sebagai techno-park untuk industri yang tidak menimbulkan banyak polusi, tidak memakan banyak ruang, menggunakan teknologi tinggi dalam proses produksi dan pengelolaan lingkungan, dan menciptakan keuntungan yang lebih besar untuk industri manufaktur. Fasilitas dan infrastruktur terkait telah dibangun dan dioperasikan yang meliputi tenaga listrik, air bersih dan pengolahan air limbah,

sistem drainase, serta jaringan jalan.

f. Research & Development dan Pendidikan

Salah satu yang menjadi hambatan bagi industri di Indonesia dalam mengolah potensi sumber daya alam yang dimilikinya adalah karena minimnya kemampuan baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi pengolahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana yang dapat memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM dan teknologi tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Disamping itu, untuk menunjang kebutuhan SDM industri, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendidikan.

g. Regulasi

Pengembangan kawasan industri di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara industri baru lainnya seperti Korea Selatan dan Thailand. Sebagai contoh, pengembangan industri di Thailand diserahkan kepada badan otorita sehingga semua masalah perijinan, pembebasan tanah dan prasana sudah disiapkan sejak awal dan mempermudah investor untuk masuk ke kawasan industri. Pada tahun 1972, dibentuk badan otorita yaitu Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) yang bertugas untuk mengembangkan kawasan industri dan memberi pelayanan yang mudah dan cepat untuk semua kegiatan industri yaitu seperti semua proses

perijinan, pelayanan informasi-informasi seperti investasi, pendirian perusahaan, sumber pendanaan, perancangan dan konstruksi pabrik, serta studi kelayakan. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pengembangan kawasan industri khususnya dari segi peraturan atau regulasi dan manajemen pengelolaan kawasan industri.

Selain itu, standar teknis yang dibuat oleh Pemerintah dinilai terlalu kaku dan memaksa sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan mudah pada perkembangan pasar internasional. Di negara lain seperti Korea Selatan dan Thailand sudah berkembang konsep technology park dan business park dimana dalam suatu business park juga terdapat kawasan perdagangan, perumahan dan rekreasi yang dapat berupa kawasan hijau lapangan golf, seperti pada Eastern Industrial Estate di Thailand.

4. Penutup

DENGAN ciri-ciri tersebut Kawasan Industri generasi ketiga diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dan berdaya saing tinggi, mengembangkan rantai nilai perekonomian suatu daerah, menarik jumlah investasi yang lebih besar, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, berkontribusi bagi penelitian dan pengembangan sektor industri, dan mengembangkan ekosistem di dalamnya.

Selesai.



Supply Chain Energi Listrik di Kawasan IMIP

Power Plant yang terletak di kawasan PT IMIP Site Morowali. (Foto : Doc. Departemen Bisnis PT IMIP)

MOROWALI - Asap putih tipis mengumpul dari barisan cerobong setinggi 100 hingga 150 meter, sebagai tanda bahwa mesin uap bergerak di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau power plant yang berada di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Tepatnya di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. PLTU ini merupakan jantung penunjang proses operasional pengolahan bijih nikel (ore) di kawasan industri IMIP.

PLTU ini menggerakkan pabrik (smelter) milik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri IMIP. Diantaranya, PT Sulawesi Mining Investment (SMI), PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS), PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel Indonesia (ITSS), PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC), dan PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI). Total kapasitas pembangkit dari beberapa PLTU ini, berjumlah 1.317 Megawatt (MW).

Berbahan bakar batu bara, pembangkit-pembangkit ini mengalirkan listrik untuk kebutuhan produksi pabrik-pabrik di kawasan IMIP, sebagian digunakan untuk kebutuhan operasional manajemen. Di samping itu, ada 5 MW dari produksi

listrik, diberikan kepada masyarakat Kabupaten Morowali melalui kerja sama IMIP dengan PLN Suluttengo (Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo).

Masing-masing dari unit PLTU, yang berada di kawasan industri IMIP, saling terintegrasi satu sama lain. Listrik yang dihasilkan, saling mengisi ketika pembangkit yang lain membutuhkan daya untuk kebutuhan produksi. Baik untuk kebutuhan internal atau kebutuhan pengolahan bijih nikel menjadi bahan baku siap pakai.

PLTU tahap I (PT SMI) dengan kapasitas pembangkit 2x65 MW. Dalam sebulan, PLTU tahap I ini mampu memproduksi listrik sebesar 75,122,000 kWh (Kilo Watt Hour). Daya listrik itu, kemudian didistribusikan untuk kebutuhan produksi ferronickel sebesar 93.607.000 kWh, 6.931.000 kWh disalurkan untuk kebutuhan internal, dan 5.000 kWh disalurkan untuk kebutuhan warga Morowali. Selain itu, PLTU tahap I ini juga menyuplai kelebihan listrik demi kebutuhan PLTU tahap II (PT GCNS, -red.), yakni 2.328.000 kWh.

Pada PLTU tahap II (PT GCNS), berkapasitas 2x150 MW, mampu memproduksi listrik sebesar 197.900.000 kWh per bulan. Pendistribusiannya, masing-masing

41.632.000 kWh disuplai untuk kebutuhan PLTU tahap I (PT SMI), 8.010.000 kWh untuk kebutuhan PLTU tahap III (PT ITSS), 17.153.000 kWh untuk kebutuhan internal PT GCNS, dan 150.420.000 kWh demi kebutuhan produksi stainless steel (baja nirkarat).

“Untuk PLTU tahap III (PT ITSS), kapasitasnya 2x350 MW. Produksi listriknya, 436.200.000 kWh per bulan. Dari angka itu, kita distribusikan 22.641.000 kWh guna kebutuhan internal PT ITSS, 17.790.000 kWh, kita suplai juga untuk kebutuhan PLTU tahap II (PT GCNS), dan 408.262.000 kWh untuk kebutuhan smelter,” urai Hilman Jaya, Superintendent Power Plant, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Pada PLTU tahap IV (PT IRNC), lanjut Hilman, berkapasitas 2x25 MW. Dalam sebulannya, pembangkit ini mampu memproduksi listrik sebesar 13.724.000 kWh. Produksi listrik dari pembangkit itu, hanya digunakan untuk kebutuhan internal semata serta kebutuhan produksi ferrochrome.

Selain itu, kata Hilman, pada PLTU tahap V (PT TSI 1), berkapasitas 2x7 megawatt (MW). Dalam sebulannya, pembangkit ini mampu menghasilkan listrik mencapai 2.057.000 kWh. Sama

dengan PLTU tahap IV, produksi listrik yang dihasilkan hanya digunakan untuk kebutuhan produksi nickel pig iron dan carbon steel, serta digunakan untuk kebutuhan internal.

Selanjutnya, PLTU tahap VI (PT TSI 2) berkapasitas 2x65 MW. Meski secara konstruksi telah rampung, namun saat ini masih dilakukan commissioning atau simulasi. Secara umum, commissioning dilakukan dengan tujuan menguji keseluruhan sistem yang berada di PLTU, baik dari segi keselamatan, keamanan lingkungan, serta kemampuan operasional dari PLTU itu sendiri.

“Tahun depan, satu PLTU lagi akan beroperasi di kawasan IMIP. Kapasitas dari PLTU itu sebesar 2x350 MW. Saat ini, pendirian PLTU itu telah memasuki tahap pemasangan engine,” kata Hilman.

Jika PLTU yang baru ini telah berop-

erasi, kata Hilman, kawasan PT IMIP memiliki tujuh PLTU dengan total kapasitas secara keseluruhan adalah 2.017 MW.

Di tempat terpisah, penanggung jawab PLTU PT SMI, Muhdi mengatakan, untuk menjaga kestabilan produksi listrik, yang perlu dilakukan adalah menjaga suplai batu bara. Terkadang, suplai listrik yang tidak stabil ke pabrik, juga diakibatkan suplai batu bara yang tidak maksimal.

“Faktor cuaca dan kondisi laut yang paling sering menjadi penyebab pengiriman batu bara tidak maksimal,” kata Muhdi.

Perlu diketahui pula, PLTU yang berada di kawasan IMIP ini ramah lingkungan, sebab menggunakan teknologi Electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator atau ESP, berfungsi sebagai

alat penangkap abu atau ash collection, serta mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh hasil pembakaran batubara dalam furnace. Dalam sehari, alat ini mampu menyaring 169 ton debu.

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal, PLTU yang kita miliki tergolong ramah lingkungan. Hasil uji yang dilakukan Divisi Environment PT IMIP setiap enam bulan sekali juga menyebutkan bahwa baku mutu udara PLTU yang kita punya masih berada pada angka normal,” jelas Lunaria Mardhika Jenned, staff Divisi Environment Departemen HSE PT IMIP belum lama ini. AY/DK



Control Room Power Plant yang terletak di kawasan PT IMIP Site Morowali. (Foto : Doc. Departemen Eksternal PT IMIP)

“Masing-masing dari unit PLTU, yang berada di kawasan industri IMIP, saling terintegrasi satu sama lain. Listrik yang dihasilkan, saling mengisi ketika pembangkit yang lain membutuhkan daya untuk kebutuhan produksi. Baik untuk kebutuhan internal atau kebutuhan pengolahan bijih nikel menjadi bahan baku siap pakai.”

HILMAN JAYA
Superintendent Power Plant





Perayaan Hari Kemerdekaan ke-73 RI tahun ini berlangsung istimewa di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Semangat dan kemeriahan acara lomba yang diselenggarakan adalah bentuk wujud dari semangat patriotisme karyawan. Tak kurang dari 21 cabang olah raga dipertandingkan mulai dari yang modern hingga tradisional. Dari sepak takraw, basket, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, futsal, biliard hingga tarik tambang, pukul bantal, gigit koin dan balap bakiak. Tak hanya ribuan karyawan Indonesia, karyawan asal Tiongkok pun ikut larut dalam suasana perayaan hari kemerdekaan Indonesia. "Menang Kalah Itu Biasa Tapi Kebersamaan dan Kejujuran Itu yang Utama", menjadi slogan dalam lomba.

Galeri di K





Peringatan HUT RI ke-73 Kawasan IMIP





Peabuhan Jetty yang terletak di kawasan PT IMIP Site Morowali. (Foto : Doc. Departemen Eksternal PT IMIP)

Gerbang Ekspor Kawasan Industri IMIP

MOROWALI – Dingin, kaku dan tinggi menjulang, itulah penampakan wujud dari kangaroo crane yang ada di area pelabuhan yang dikelola PT BintangDelapan Terminal (BDT) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Menurut Koordinator Pelabuhan PT BDT, Ofi Sandratama, ada 12 unit kangaroo atau jumping crane di area jetty yang dikelolanya. Fungsi dari kangaroo crane, untuk memindahkan material bahan baku dari kapal ke atas truk trailer atau berbagai produk baja anti karat yang diproduksi sejumlah smelter yang ada di kawasan PT IMIP. kapasitas angkut kangaroo crane adalah 25 ton sekali angkat.

Selain itu, untuk menunjang operasional, kata Ofi, jetty yang dikelolanya juga ditopang berbagai fasilitas, seperti misalnya gantry crane sebanyak dua unit. Fungsi gantry crane, untuk memasukkan batu

bara ke conveyor agar tidak tercecer.

Fasilitas lainnya adalah fixed crane (crane tetap) sebanyak dua unit, dengan kapasitas angkut 15 ton sekali angkat. Selain itu, fasilitas lainnya adalah conveyor. Fungsinya, untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, diantaranya batu bara. Di pelabuhan BDT, sistem conveyor yang digunakan adalah conveyor belt untuk pembongkaran batu bara curah yang diteruskan ke lokasi hanggar stockpile batu bara. Kapasitasnya, per jam conveyor ini bisa memindahkan batu bara kurang lebih 1.000 metrik ton.

Sejak berdiri pada tahun 2015 lalu, pelabuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan sebutan jetty, di kawasan IMIP Site Morowali, terus berbenah. Berjuta-juta metrik ton nickel, ferro chrome, batu bara, sampai stainless steel, keluar masuk melalui jetty ini.

Terbentuknya jetty ini, adalah hasil kerja sama antara Shanghai

“Sampai saat ini, jumlah jetty yang dikelola PT BDT sebanyak 24 Jetty. Dalam sebulan, rata-rata 200 kapal melakukan bongkar muat di jetty itu, termasuk di dalamnya kapal besar, kapal tanker dan tongkang.”

OFI SANDRATAMA
Koordinator Pelabuhan PT BDT

Decent Investment (Group) Co., Ltd dengan PT Bintang-Delapan Investama. Perusahaan Indonesia-Tiongkok ini, bersepakat mendirikan PT BintangDelapan Terminal (BDT) pada Desember 2015 lalu, untuk membangun dermaga khusus kargo curah yang berkapasitas 92.500 ton.

Proyek itu terletak di kawasan IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang berada di sisi timur laut menghadap ke Laut Banda. Sebuah dermaga yang dibangun dengan panjang 280 meter dan lebar 28 meter, dilengkapi 3 kapal grab unloader tipe jembatan, terus memenuhi aktivitas pembongkaran kapal kargo curah.

Dermaga itu terhubung dengan daratan melalui sebuah jembatan penyambung sepanjang 55,64 meter dan lebar 12,5 meter. Di bagian sisi atasnya, terpasang dua jalur sabuk dan koridor conveyor, dengan desain kemampuan bongkar muat sebanyak 8 juta ton. Total investasi dari pembangunan fasilitas itu mencapai US\$ 81,55 juta.

Sampai saat ini, jumlah jetty yang dikelola PT BDT sebanyak 24 Jetty. Dalam sebulan, rata-rata 200 kapal melakukan bongkar muat di jetty itu, termasuk di dalamnya kapal besar, kapal tanker dan tongkang.

Seluruh jetty itu, memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya hanya terdapat pada draft atau muatan kapal yang dapat berlabuh di jetty itu. Jetty 1, panjang 220 meter dengan lebar 25 meter, draft maksimum 16,5 meter, deadweight tonnage (DWT) atau bobot mati maksimum 55.000 DWT. Jetty 2, panjang 280 meter dengan lebar 25 meter, draft maksimum 16,5 meter, DWT maksimum 100.000 DWT. Sementara, jetty 3 sedang dalam proses pembangunan.

Jetty 4, panjang 190 meter, lebar 20 meter, draft maksimum 9,8 meter, DWT maksimum 30.000 DWT. Jetty 5, panjang 115 meter dan lebar 20 meter, draft maksimum 8 meter, DWT maksimum 11.000 DWT. Jetty 6, panjang 80 meter dan lebar 15 meter, draft maksimum 5 meter, DWT maksimum 2.500 DWT (khusus kapal tanker). Jetty 7 dan 8, panjang 60 meter, lebar 15 meter, draft maksimum 4 meter (khusus tempat sandar tug boat dan kapal akomodasi). Sementara, jetty 9 hingga 24, masing-masing panjang 25 meter, lebar 15 meter dan draft depan maksimum 4 meter (khusus sandar untuk tongkang, LCT, dan SPB).



Lebih lanjut Ofi menjelaskan, kelebihan yang dimiliki pelabuhan BDT adalah terdapat banyak dermaga atau jetty yang disesuaikan dengan kondisi kapal. Dengan begitu, jelas Ofi, kegiatan operasional bongkar muat akan lebih cepat dan mengurangi kapal berlabuh di tengah laut. Selain itu, berbagai macam fasilitas penunjang operasional juga lebih mengefisienkan durasi waktu proses kegiatan bongkar muat.

Ofi menyebut, kelebihan lainnya adalah sumber daya manusia yang bekerja sangat mumpuni. Mulai dari crew, operator crane, operator alat berat dan truk, serta pengawas lapangan yang kompeten di bidangnya. Di samping itu juga, sistem kerja yang cepat dan tetap mengedepankan keselamatan kerja.

“Jetty BDT termasuk yang modern, karena hampir semua alat pendukung untuk melakukan kegiatan pemuatan dan pembongkaran untuk menunjang kegiatan industri pertambangan itu kita punya,” terang Ofi.

Berbicara soal tenaga kerja yang ada di jetty, Ofi menyebutkan, rasio jumlahnya adalah tenaga kerja Indonesia 95 persen dan tenaga kerja asing 5 persen. Menyangkut pengawasan, pemeliharaan alat dan kelancaran produksi, misalnya pemeliharaan crane, conveyor, alat-alat berat serta pengawasan pemuatan stainless steel, masih dilakukan oleh tenaga kerja asing. Selebihnya, dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.

“Untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif, sebelum melaksanakan pekerjaan diadakan briefing atau meeting di lapangan. Fungsinya untuk mengingatkan setiap karyawan supaya mengutamakan keselamatan

kerja dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), dan melaksanakan kerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian di bidangnya dan sesuai dengan peraturan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Ofi.

Ofi mengatakan, setiap ada kegiatan pembongkaran dan pemuatan, terdapat staff dari Departemen Safety dan seorang pengawas dari masing-masing anggotanya yang bekerja di jetty. Selain itu, guna meminimalisir debu akibat pembongkaran barang curah seperti batu bara, ferrochrome, dan lain sebagainya, di area stockpile dan hanggar sudah dipasang pagar pembatas yang cukup tinggi. Langkah lainnya, juga dilakukan penyiraman rutin di sekitar area jetty, setiap waktu yang telah ditentukan dengan water truck.

Pada dasarnya, pelabuhan jetty ini merupakan bagian penting dari infrastruktur dasar yang terdapat di kawasan industri IMIP. Keberadaan jetty itu sendiri, telah menggabungkan jalur pelayaran internasional yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia antara kawasan industri IMIP dengan dermaga 50.000 ton milik Tsingshan di kota Fuan Provinsi Fujian, Tiongkok.

Tugas itu tentunya sangat penting. Apalagi dalam mendorong perkembangan kawasan IMIP secara pesat. Dengan peralatan dermaga, filosofi operasi, metode manajemen dan lainnya diikuti dengan transfer dan penyebaran teknologi akan mendorong kemajuan pekerja konstruksi, manajemen dan tenaga teknis terminal setempat, meningkatkan perkembangan teknologi dermaga, menggerakkan perkembangan ekonomi setempat maupun Indonesia dalam arti yang luas. AY/DK

IMIP Kirim Relawan Untuk Korban Gempa



MOROWALI - Sehari setelah peristiwa tsunami dan gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala tanggal 28 September lalu, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengirim tim relawan untuk membantu puluhan ribu warga yang menjadi

korban di tiga wilayah itu.

Selain tim relawan, PT IMIP juga mengirim dua mobil serba guna, satu unit mobil ambulance dan empat unit alat berat. Seluruh peralatan itu digunakan untuk membantu evakuasi warga yang masih tertimbun bangunan hotel dan rumah yang ambruk akibat gempa.

PT IMIP juga mengirim puluhan ton bantuan paket sembako dan pakaian bekas bagi para warga korban gempa. Bantuan sembako yang disalurkan itu, sebagian juga merupakan hasil sumbangan puluhan ribu karyawan yang bekerja di dalam kawasan PT IMIP.

Direktur Operasional PT IMIP Site Morowali, Irsan Widjaja mengatakan, pengiriman tim relawan dan bantuan sembako itu merupakan bentuk kepedulian manajemen perusahaan dan para karyawan atas bencana yang dialami warga di Kota Palu, Sigi dan Bombana.

"Kami sangat prihatin dengan nasib dan kondisi warga yang menjadi korban gempa. Semoga bantuan yang disalurkan ini bisa bermanfaat untuk mereka," kata Irsan Widjaja.

Irsan mengatakan, selain difungsikan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit, satu unit ambulance milik PT IMIP juga difungsikan sebagai mobile clinic untuk memberikan pelayanan kesehatan keliling baik kepada warga korban gempa maupun para relawan yang ikut terluka saat melakukan upaya evakuasi. DK



96 Maba PILM Dilantik

MOROWALI - Sebanyak 96 Mahasiswa Baru (Maba) Politeknik Industri Logam Morowali (PILM), tahun ajaran 2018-2019, dilantik. Dari jumlah itu, masing-masing Teknik Perawatan Mesin (TPM) sebanyak 32 orang, Teknik Listrik Instalasi (TLI) 32 orang, dan Teknik Kimia Mineral (TKM) 32 orang.

Direktur PILM, Prof. DR. Isa Setiasyah Toha, mengatakan, sedikit berbeda dengan mahasiswa pada umumnya, para mahasiswa PILM merupakan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi. Secara garis besar, unsur keterampilan menjadi hal penting dalam proses perkuliahan.

Ketua Dewan Penyantun Politeknik Industri Logam Morowali, yang juga sebagai founder kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Halim Mina menyatakan, pendirian Politeknik Industri Logam Morowali, tidak terlepas

dari perkembangan yang pesat dari kawasan industri Morowali. Tentunya, perkembangan industri juga harus diikuti penyediaan sumber daya manusia nya.

"Saat ini lebih dari 27.000 tenaga kerja langsung yang bekerja dalam kawasan IMIP. Diperkirakan tahun 2022-2023 tenaga kerja langsung mencapai 30.000 - 35.000, dengan tenaga kerja sekunder dan tersier sebanyak 20.000 sampai 25.000 tenaga kerja. Sehingga keterlibatan stakeholder individu dalam proses bisnis kawasan IMIP mencapai 50.000 sampai 60.000 tenaga kerja," urai Halim Mina.

Dari jumlah itu, lanjut Halim Mina, diharapkan mereka yang akan lulus dari Politeknik Negeri Logam Morowali dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja level D3 dan D4 sebesar 1.600 dan 1.350 tenaga kerja. AY/DK



Basmi DBD di Bahodopi

MOROWALI - PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, selama tiga hari melakukan fogging di sejumlah desa yang terdapat kasus DBD, diantaranya Desa Lalampu, Bahodopi, Keurea, Labota, dan Fatufia.

"Kalau ada temuan kasus, terlebih dulu akan dilakukan penelitian epidemiologi di lokasi. Sesuai dengan petunjuknya, radiusnya adalah 100 meter. Sebab, nyamuk hanya bisa terbang maksimal 100 meter," urai Pengelola program Pencegahan Penyakit Malaria dan DBD UPTD Puskesmas Bahodopi, Yuliana.

Yuliana mengatakan, fogging merupakan upaya pemberantasan nyamuk bukan upaya pencegahan. Sehingga, tindakan fogging akan dilaksanakan apabila terdapat kasus DBD dan memenuhi kriteria fogging.

Berdasarkan data UPTD Puskesmas Bahodopi, pada periode Januari hingga Desember 2017 lalu, jumlah kasus DBD sebanyak 25 kasus.

Terbanyak di Desa Fatufia, 10 kasus. Sedang, Desa Bahodopi sebanyak 9 kasus, Lalampu 2 kasus, Keurea 2 kasus, dan Desa Bahomakmur 2 kasus. Sementara itu, pada periode Januari sampai Agustus 2018, tercatat satu kasus di Desa Fatufia.

Data berbeda mengenai kasus DBD diperoleh dari Klinik PT IMIP, yang mencatat pada periode Januari sampai Agustus 2018, jumlah kasus DBD mencapai 186 kasus. Banyaknya jumlah pasien itu, disebabkan mayoritas masyarakat Kecamatan Bahodopi terlebih dulu memeriksakan diri ke Klinik PT IMIP yang memberikan layanan kesehatan gratis, sebelum akhirnya meminta rujukan untuk berobat ke rumah sakit yang terletak di Bungku.

Penanggung jawab Klinik IMIP, dr Friselina Nuransi, mengatakan bahwa fogging yang dilakukan bertujuan untuk memberantas nyamuk dewasa yang kemungkinan baru melewati masa pertumbuhannya. Dirinya menyebutkan, waktu yang dibutuhkan jentik nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa adalah delapan hari.

Kalau untuk pencegahan, dr Friselina, sebenarnya masyarakat harus lebih sadar dengan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Semakin sering dibersihkan, nyamuk juga akan sulit untuk berkembang biak.

Lebih lanjut dr Friselina Nuransi mengatakan, tindakan fogging memang hanya membasmi nyamuk dewasa. Sehingga, untuk membasmi jentik-jentik nyamuk itu, langkah yang dilakukan adalah dengan pemberian bubuk Abate.

"Fogging sebenarnya kurang efektif, apabila tidak ditindaklanjuti dengan gerakan 3M (menguras, menutup, mengubur). Mencegah lebih efektif dari pada mengobati atau memberantas," pungkasnya. AY/DK

Kampanye Tertib Lalu Lintas



MOROWALI - Ratusan kendaraan roda dua, konvoi di jalan untuk mengkampanyekan tertib lalu lintas, Minggu (16/9). Konvoi yang dimulai dari Lapangan Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi, berakhir di Dusun Kurisa Desa Fatufia.

Koordinator Lapangan Kampanye Lalu Lintas, yang juga Staff Divisi Community Relation (Comrel) PT IMIP Site Morowali, Iswanto mengatakan, kegiatan yang diinisiasi Kerukunan Masyarakat Kecamatan Bahodopi (KMKB), PT IMIP Site Morowali, serta Kepolisian Resort (Polres) Morowali, diikuti lebih dari 20 klub motor, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Pertambangan dan Energi (FPE), KSBSI, dan Karang Taruna Kecamatan Bahodopi itu. Tujuannya, memberikan edukasi kepada masyarakat, supaya selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

"Sosialisasi itu juga bertujuan untuk mengajak seluruh stakeholder supaya bersama-sama mengurangi kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Bahodopi," terang Iswanto. AY

Musala Baru di TSI



MOROWALI - Tempat ibadah tentunya menjadi kebutuhan dan fasilitas yang diharapkan oleh karyawan yang bekerja di sejumlah perusahaan di dalam kawasan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Menyadari hal itu, manajemen PT Tshingshan Steel Indonesia (TSI) belum lama ini membangun dan menyiapkan fasilitas ibadah buat karyawan khususnya yang beragama muslim.

Untuk mendukung kinerja karyawan, fasilitas musala itu sengaja dibangun di sekitar lokasi pabrik TSI. Selain mampu menampung kurang lebih 70 jamaah, musala seluas 100 meter persegi ini juga dilengkapi tempat berwudhu.

Uniknya, pembangunan musala ini dikomandoi oleh Mr. Rao Zhi Xiong, Kepala Divisi Sinter Departemen BF feronikel PT TSI.

"Pembangunan musala ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas spiritual dan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual karyawan, khususnya yang muslim," kata Mr. Rao Zhi Xiong saat didaulat memberi sambutan pada peresmian musala pertengahan September lalu.

Sebelumnya, kata Mr. Rao, karyawan-karyawan muslim ketika mau beribadah harus ke masjid atau musala di dalam kawasan PT IMIP yang jaraknya cukup jauh dengan lokasi pabrik PT TSI. Atas dasar itu, manajemen TSI kemudian berinisiatif membangun musala di sekitar lokasi pabrik.

Untuk diketahui, saat ini jumlah rumah ibadah muslim di kawasan industri IMIP, masing-masing empat masjid dan sembilan musala yang tersebar di beberapa pabrik (smelter). AY/DK




PRAY FOR
PALU-SIGI-DONGGALA
SULAWESI TENGAH

IMIP INDONESIA
MOROWALI
INDUSTRIAL PARK

Aksi Kemanusiaan untuk Palu-Sigi-Donggala

#IMIPPeduli

Merawat Luka, Merajut Asa

